

## **Pengalihan Hutan Pulau Mendanau DKP dan Dephut Diminta Bertindak**

[JAKARTA] Pemerintah Pusat diminta segera bertindak menghentikan pengalihan fungsi hutan produktif di Pulau Mendanau, Provinsi Bangka Belitung (Babel) menjadi pertambangan.

Sebab, kebijakan pengalihan fungsi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belitung itu bertentangan dengan undang-undang.

Hal itu disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Mendanau Dedy Siswoyo dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Minggu (3/8).

Dikatakan, pihaknya sudah mengirim surat penolakan tertulis ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2008. Surat serupa juga dilayangkan ke sejumlah menteri terkait seperti Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Ketua KPK sebagai tembusan. "Sekarang kami dalam posisi menunggu tanggapan dari mereka," ujarnya.

Dijelaskan, warga Pulau Mendanau ingin fungsi pulau dikembalikan seperti semula, yakni menjadi lahan hutan produksi, konservasi, perikanan, dan pariwisata.

Menurut dia, pengalihan fungsi lahan bertentangan dengan UU 27 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pulau Kecil dan Pesisir serta larangan melakukan aktivitas pertambangan di area pulau yang luasnya kurang dari 2.000 kilometer persegi (km<sup>2</sup>).

Dijelaskan, sebagian besar warga di pulau itu menolak kegiatan pertambangan.

Alasannya, karena luas pulau kurang dari 2.000 km<sup>2</sup>, yakni hanya 137 km<sup>2</sup>. Karena itu, kegiatan pertambangan tidak diizinkan. Area pulau itu hanya dapat dimanfaatkan untuk konservasi, perikanan, dan pariwisata.

### **Kesalahan Pemerintah**

Namun, Pemkab melalui Bupati Darmansyah Husein tetap memberi izin pertambangan. Surat izin nomor 002/SKPKPD/DPE tanggal 3 Maret 2008 diberikan ke PT Pamin Kanaan (PT PK) untuk menambang bauksit. Sejak mendapat izin, perusahaan itu mulai melakukan penambangan di dua desa di Kecamatan Selat Nasik.

Di tempat terpisah, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Roffandi Ahmad menilai, konflik yang selalu terjadi antara sektor kehutanan dan pertambangan tidak luput dari kesalahan pemerintah. Selama ini pemerintah, pihak Departemen Kehutanan (Dephut) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak serius membahas permasalahan tumpang tindih izin kehutanan dan pertambangan.

Konflik yang mencuat antara perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan (HPH) dengan perusahaan tambang, penyelesaiannya sebaiknya melibatkan Menko Perekonomian. [Y-4/H-13]